



## Bareskrim Selamatkan Kerugian Negara Rp 217 Miliar

**JAKARTA**—Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim terus berupaya melakukan penyelamatan kerugian negara. Kemarin (19/1) direktorat yang dipimpin Brigjen Akhmad Wiyagus mengungkapkan penyelamatan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kredit fiktif Bank Jawa Barat Syariah (BJBS) senilai Rp 217 miliar. Nilai sebesar itu dalam bentuk delapan aset bergerak dan tidak bergerak.

Akhmad Wiyagus menuturkan, BJBS ini diduga memberikan kredit fiktif kepada PT Hastuka Sarana Karya (PT HSK) dan CV Dwi Manunggal Abadi (DMA). Nilai kerugian negara dalam kasus tersebut Rp 548 miliar. Setelah ditelusuri ada sejumlah aset yang diduga terkait dengan perkara tersebut. "Tujuh tanah dan satu buah mobil," jelasnya.

Ketujuh tanah itu, empat diantaranya berada di Bandung dan tiga sisanya berada di Garut. Untuk tanah di Bandung, yakni tanah seluas 7 ribu meter persegi di jalan Bukit Pakar Timur, Cimenyan, Bandung. Lalu, tanah yang terletak di Jalan Wastukencana Bandung seluas 1.522 meter persegi. "dua tanah lainnya di Jalan Inggit seluas 1.493 meter persegi dan Jalan Malabar seluas 7.740 meter persegi," paparnya.

Untuk tanah di Garut, jauh lebih luas dari pada di Bandung. Yaitu, tanah dengan luas lebih dari 15 ribu meter persegi di jalan Pembangunan Blok Untung, Garut, Jawa Barat. Ada

pula tanah dengan uas 13.884 meter persegi di jalan Pembangunan Blok Gordah. "Serta, Sertifikat dan tanah di Garut seluas 1.400 meter persegi," jelasnya. Untuk sertifikat dari tanah itu atas nama yang berbeda-beda, namun dimiliki oleh Andi Winarto. Wiyagus menjelaskan bahwa Andi merupakan nasabah yang menerima kredit BJBS atau pimpinan PT HSK. "Untuk Andi sendiri saat ini masih proses pemeriksaan," tuturnya.

Total nilai aset yang disita tersebut ditaksir mencapai Rp 217.056.620.000. Nilai yang berhasil diselamatkan bila dipresentasikan mencapai lebih dari 40 persen kerugian negara dalam kasus kredit fiktif BJBS. Total kerugian negara sesuai taksiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai Rp 548.259.832.594. "Atrinya masih ada sisa kerugian negara Rp 307 miliar," ujarnya. Menurutnya, penyidik masih berupaya untuk mengejar penyelamatan kerugian negara yang tersisa tersebut. Targetnya, semua aliran dana yang berasal dari uang kredit fiktif bisa dikembalikan ke negara. "Kami teliti satu per satu," jelasnya.

Kasus tersebut cukup unik. Pasalnya, BJBS mau untuk memberikan kredit kepada PT HSK dan DMA, dengan agunan tanah dan bangunan Garut Super Blok (GSP). Namun, ternyata belakangan GSP itu telah diagunkan ke bank lainnya. Sudah ada satu tersangka dalam kasus tersebut, yakni Plt Dirut BJBS Yocie Gusman. (idr)